

**PENGARUH JUMLAH TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH LAMONGAN  
(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Lamongan)**

Nur Aini Maulidhia<sup>1</sup>, Mokhtar Sayyid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>na695422@gmail.com, D3 Perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

<sup>2</sup>sayyidaksmi@gmail.com D3 Perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

---

**Article Informatin:**

---

**Abstractin English (Times New Roman 10, Italic, Bold, spasi 1)**

---

**Keywords:**

Sales and Purchase Transactions, BPHTB Tax, Regional Tax Revenue

---

**Article History:**

Received :  
Revised :  
Accepted :

---

**Article Doi:**

---

This study analyzes the effect of the number of land sale and purchase transactions and building and BPHTB tax revenue on local tax revenues in Lamongan Regency during the 2015-2020 period. The data was processed using descriptive analysis verification method with a quantitative approach. The results show that partially the number of land and building sale and purchase transactions and BPHTB taxes have a significant effect with  $t_{count} > t_{table}, 4,756 > 3,182$  significance  $0.022 > 0.05$ . Simultaneously, the number of land and building sale and purchase transactions and BPHTB taxes together have a significant effect on Regional Taxes with  $F_{count} > F_{table}$ , significance  $> 0.05$ . BPHTB tax revenues continue to fluctuate every year, but BPHTB taxes on buying and selling transactions have increased. This is due to the higher prices of land and buildings in Lamongan Regency. Realization of BPHTB tax revenues for the 2015 to 2020 period. Local tax revenues in Lamongan Regency during the 2015-2020 period experienced ups and downs, although they did not reach the predetermined target. The increase in the realization of local tax revenues was due to the realization of several tax revenues that had exceeded 100% or were over the target. The sale and purchase transactions of land and buildings partially have a significant effect on local tax revenues in Kab.lamongan due to the increase in investment in land and buildings (property) in Kab.lamongan. BPHTB tax revenues partially have a significant effect on local tax revenues due to the increase in the NJOP of building land and many infrastructure development projects in Lamongan Regency.

---

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan BPPD Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi jual beli tanah dan atau bangunan di Kabupaten Lamongan mengalami fluktuatif yang cenderung naik turun setiap tahunnya. Dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 72 transaksi tetapi, di tahun 2017 sampai dengan 2018 transaksi jual beli tanah dan atau bangunan cenderung menurun. Menurunnya jumlah transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Lamongan dikarenakan harga tanah dan bangunan yang meningkat setiap tahunnya pada tahun 2018 sampai 2019 harga jual beli tanah dan bangunan mengalami peningkatan karena di tahun tersebut harga tanah masih standart, kemudian tahun 2019 sampai 2020 harga jual beli tana dan bangunan mengalami penurunan kembali karena harga tanah pada tahun tersebut mengalami fase sedang gencar mahal – mahal nya, sehingga tahun 2019 harga jual beli tanah dan bangunan mengalami penurunan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Badrudin,2011).

Pendapatan di negara Indonesia khususnya di bidang fiskal dibagi menjadi dua yaitu pendapatan pusat dan pendapatan daerah. Pendapatan pusat merupakan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pendapatan daerah merupakan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data dari Bapenda Lamongan pendapatan pajak daerah berasal dari sebelas jenis pajak daerah, kesebelas jenis pajak daerah tersebut memiliki peran masing-masing dalam menyumbang pendapatan pajak daerah. Jenis pajak daerah yang berkontribusi besar dalam menyumbang pendapatan pajak daerah kabupaten lamongan pada tahun 2020 yaitu pajak air tanah sebesar 122,14% dan PBB-P2 jumlah wajib pajak pada tahun 2020 sebesar 102,04 %, kemudian diposisi ke tiga yaitu pajak restoran sebesar 99.55%, dan ke empat Pajak penerangan jalan sebesar 97,15 %, ke lima pajak reklame sebesar 83,50 %, ke enam BPHTB sebesar 82,33%, dan ke tujuh pajak hotel sebesar 64,40%, ke delapan pajak parkir 56,44 %, sembilan yaitu pajak sarang burung walet 53,33%, sepuluh yaitu pajak minerba sebesar 44,09% dan yang ke sebelas yaitu pajak hiburan 43,10%.

**Tabel 1.1.**  
**Data Target dan Realisasi pajak BPHTB di Kabupaten Lamongan**

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	Rp14,000,000,000	Rp16,210,351,129	115.8
2016	Rp33,000,000,000	Rp37,103,822,037	112.4
2017	Rp39,000,000,000	Rp39,133,622,942	100,34
2018	Rp36,000,000,000	Rp15,516,736,451	43,10
2019	Rp36,000,000,000	Rp25,223,621,468	70,07
2020	Rp27,000,000,000	Rp22,227,919,709	82,33
Rata-Rata	Rp30,833,333,333	Rp22,119,178,956	114.1

*Sumber: BAPENDA Lamongan*

Jika kita perhatikan realisasi penerimaan BPHTB setiap tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2020 realisasi penerimaan BPHTB sudah mencapai target yang ditetapkan rata-ratanya yaitu 114.1 % per tahun.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengaruh jumlah transaksi jual beli tanah terhadap pajak daerah, pengaruh pajak BPHTB terhadap pajak daerah, serta pengaruh jumlah transaksi jual beli tanah dan BPHTB terhadap pajak daerah kabupaten lamongan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut (Waluyo,2009) :“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

### Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
2. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

### Pengertian (BPHTB)

Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar hukum BPHTB yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Terkait pajak ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lebih tepatnya tercantum dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 93. Hak atas tanah dan atau bangunan merupakan hak atas tanah, termasuk Hak Pengelolaan, termasuk bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Hal ini berarti BPHTB hanya boleh dikenakan atas perolehan hak yang diatur dalam undang-undang pokok agraria (UUPA), Undang-Undang Rumah Susun, dan Hak Pengelolaan. Perolehan hak-hak atas tanah lain yang berkembang di masyarakat adat tetapi tidak diakui oleh UUPA tidak boleh dikenakan BPHTB.

### Dasar Perhitungan BPHTB

Sesuai dengan Pasal 87 UU PDRD yang menjadi dasar pengenaan Pajak pada BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), Karena pada dasarnya ada lima belas jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi objek pajak, setiap jenis peralihan hak tersebut harus ditentukan Nilai Perolehan Objek Pajaknya.

Rumus:

$$\text{BPHTB Terhutang} = \text{Tarif X (Npop - Npoptkp)}$$

*Sumber : UU. No. 28 tahun 2009*

Dengan demikian yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) yang ditentukan sebesar harga transaksi. Namun apabila nilai NPOP (nilai transaksi) ternyata lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), maka yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah nilai pada NJOP PBB.

### 3. METODOLOGI

Penelitian adalah sebuah cara yang digunakan untuk menemukan suatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau rumusan dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan ilmiah (Ningsih,2011). Jenis penelitian yang digunakan ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif sebagai dasar dalam melakukan penulisan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2021 di kantor badan pendapatan daerah yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No. 1, Pagerwojo, Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62216. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder cara pengumpulan data dalam penelitian tidak harus langsung oleh peneliti akan tetapi dapat dilakukan dengan bantuan pihak lain. Sedangkan sumber data yang digunakan peneliti yaitu data sekunder, dimana data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, salah satunya data yang tersedia di tempat-tempat tertentu, seperti data dari Bapenda.

Dalam penelitian ini populasi yang ada adalah data dari seluruh laporan tahunan sehingga populasi dalam penelitian ini adalah *infinite populations* (tidak terhingga) dikarenakan jumlah yang dijadikan sampel tidak dapat diketahui dengan pasti. Sedangkan, terkait sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan perpajakan daerah lamongan yang terdiri dari penerimaan pajak BPHTB dan pendapatan pajak daerah pada tahun 2015-2020. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini juga diambil dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Laporan Realisasi Pajak Bumi dan Bagunan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2015-2020.

Metode pengumpulan data yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan karyawan Kantor Notaris dan PPAT Hj. Erna Mastiningrum SH.MK.n. serta dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yakni variabel penentu (variabel bebas) atau variabel yang mempengaruhi yaitu harga tanah dan bangunan (BPHTB) dan yang kedua adalah variabel yang ditentukan atau variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi yaitu besarnya penerimaan pajak daerah di Kabupaten lamongan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten lamongan selama 6 tahun yakni dari 2015 sampai dengan tahun 2020. Dalam analisis ini digunakan tabel dan grafik untuk mendeskripsikan keadaan yang terjadi di lapangan.

**Tabel 1.1 pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi**

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	No desicison	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positifatau negative	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

**Tabel 1  
 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

**Coefficientsa**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	72162040451,215	13652582721,162		5,286	,013
Jual	,681	,143	5,677	4,756	,018
BPHTB	-12,884	2,941	-5,230	-4,381	,022

(Sumber : Output SPSS versi 20)

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$PAD = 72162040451,215 + 0,681 X_1 - 12,884 X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 72162040451,215 yang berarti apabila jual belidan BPHTB bernilai 0 maka PAD sebesar 72162040451,215. Nilai koefisien regresi untuk jual beli sebesar 0,681 yang berarti apabila BPHTB naik 1% maka PAD juga akan naik sebesar 0,681%. Sama halnya dengan BPHTB yang mempunyai nilai koefisien sebesar -12,884 yang berarti apabila BPHTB naik 1% maka PAD juga akan turun sebesar -12,884%.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2819733679476588400000,000	2	1409866839738294200000,000	13,482	,032 <sup>b</sup>
Residual	313718167450150960000,000	3	104572722483383650000,000		
Total	3133451846926739000000,000	5			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), BPHTB, Jual

- 1) Nilai  $F_{hitung}$  sebesar 13,482 dan  $F_{tabel}$  sebesar 9,552. Maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  sebesar  $13,482 > 9,552$  sehingga  $H_0$  ditolak.
- 2) Nilai signifikansi sebesar  $0,032 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak.  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel transaksi jual beli dan BPHTB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, maka hipotesis ( $H_3$ ) yang menyatakan

bahwa transaksi jual beli dan BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD dapat diterima.

**Tabel 4.9. Hasil Uji Statistik t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	72162040451,215	13652582721,162		5,286	,013
	Jual	,681	,143	5,677	4,756	,018
	BPHTB	-12,884	2,941	-5,230	-4,381	,022

**Sumber : Output SPSS versi 20)**

Berdasarkan hasil tabel di atas maka hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) adalah sebagai berikut :

1. Variabel Transaksi jual beli tanah dan bangunan (X1)  
 Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut dengan uji t :
  - 1) Merumuskan hipotesis
    - a.  $H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya variabel jual beli tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.
    - b.  $H_1 : \beta_1 \neq 0$ , artinya variabel jual beli berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.
  - 2) Menentukan *Level Of Significance*  
*Level of significance* yang digunakan sebesar 5% atau  $(\alpha) = 0,05$
  - 3) Menentukan daerah penerimaan dan penolakan  $H_0$   
 Menentukan nilai  $t_{tabel}$  dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 ( $0,05/2 = 0,025$ ), dengan rumus  $df = n-k-1 = 6-2-1 = 3$ , maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 3,182 Maka dapat ditentukan daerah penerimaan dan penolakan sebagai berikut :
    - a.  $H_0$  diterima, Jika nilai Sig.  $> 0,05$ .
    - b.  $H_0$  ditolak, Jika nilai Sig.  $< 0,05$ .
    - c.  $H_0$  diterima, jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$
    - d.  $H_0$  ditolak, jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$
  - 4) Mengambil keputusan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  atau nilai signifikan dan  $\alpha$ .
    - a. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,756 dan  $t_{tabel}$  3,182. Maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $4,756 > 3,182$  sehingga  $H_0$  ditolak.
    - b. Nilai signifikansi sebesar  $0,018 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak.
  - 5) Kesimpulan  
 $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel jual beli berpengaruh signifikan terhadap Pajak daerah, maka hipotesis ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa jual beli berpengaruh signifikan terhadap PAD dapat diterima.
2. BPHTB (X2)  
 Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut dengan uji t :
  - 1) Merumuskan hipotesis
    - a.  $H_0 : \beta_2 = 0$ , artinya variabel BPHTB tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.

- b.  $H_1 : \beta_2 \neq 0$ , artinya variabel BPHTB berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.
- 2) Menentukan *Level Of Significance*  
*Level of significance* yang digunakan sebesar 5% atau  $(\alpha) = 0,05$
- 3) Menentukan daerah penerimaan dan penolakan  $H_0$   
Menentukan nilai  $t_{tabel}$  dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 ( $0,05/2 = 0,025$ ), dengan rumus  $df = n-k-1 = 6-2-1 = 3$ , maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 3,182. Maka dapat ditentukan daerah penerimaan dan penolakan sebagai berikut :
- a.  $H_0$  diterima, Jika nilai Sig.  $> 0,05$ .  
b.  $H_0$  ditolak, Jika nilai Sig.  $< 0,05$ .  
c.  $H_0$  diterima, jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$   
d.  $H_0$  ditolak, jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$
- 4) Mengambil keputusan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  atau nilai signifikan dan  $\alpha$ .  
a. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar -4,381 dan  $t_{tabel}$  3,182. Maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sebesar  $-4381 < 3,182$  sehingga  $H_0$  ditolak.  
b. Nilai signifikansi sebesar  $0,022 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak.
- 5) Kesimpulan  
 $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD, maka hipotesis ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD dapat diterima.

## 1. Pengaruh jumlah transaksi jual beli tanah terhadap pajak daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan uji t, Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,756 dan  $t_{tabel}$  3,182. Maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $4,756 > 3,182$  sehingga  $H_0$  ditolak. Nilai signifikansi sebesar  $0,018 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel jual beli berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham, maka hipotesis ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah Kabupaten Lamongan dapat diterima.

Koefisien regresi variabel Jual beli bernilai positif sebesar 1,632. Nilai signifikansi menunjukkan bahwa 0,018 yang nilainya lebih kecil dari pada  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel jual beli tanah berpengaruh positif terhadap pajak daerah.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Ady supratno, (2018). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel jual beli tanah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pajak daerah. Menunjukkan bahwa semakin besar transaksi jual beli tanah, maka laba yang diperoleh akan meningkat.

## 2. Pengaruh pajak BPHTB terhadap Pajak daerah.

Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan uji t, Nilai  $t_{hitung}$  sebesar -4,381 dan  $t_{tabel}$  3,182. Maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sebesar  $-4,381 < 3,182$  sehingga  $H_0$  ditolak. Nilai signifikansi sebesar  $0,022 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel BPHTB berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah, maka hipotesis ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD dapat diterima.



bangunan dan BPHTB diharapkan dapat membantu BAPENDA untuk mengadakan program sosialisasi kepada masyarakat serta peningkatan kesadaran masyarakat atas kewajiban wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan BPHTB terhadap perolehan pendapatan daerah di kabupaten Lamongan.

2. Bagi Universitas

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi jual beli tanah dan bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pajak daerah Kabupaten Lamongan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian adalah menambah variabel. Dan diharapkan mendapatkan data keseluruhan sehingga tahu pengaruh Transaksi jual beli tanah dan bangunan serta BPHTB terhadap PAD serta perhitungan keseluruhan, efektifitas dan kontribusi yang ada di daerah lain selain di Kabupaten Lamongan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanah (2015), Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi empiris pada Kecamatan Kecamatan di Kota Tangerang Periode 2010 s.d. 2013, *Ultima Accounting Vol 7. No.1. Juni 2015.*
- BPS Kabupaten Sambas (2017) Kabupaten Sambas Dalam Angka 2017
- Badrudin, Rudy. 2011. *Rudy Badrudin, Ekonomi otonomi daerah, UPP STIM YKPN Yogyakarta.* Diakses 2017. <http://scholar.google.com>.
- bid, I. t.thn. 7.
- Ibid. 2015. "tinjauan yuridis kedudukan hak atas tanah dan bangunan."
- idris, muhammad. 2020. *kompas.* sabtu desember. Diakses 26. <https://amp.kompas.com/money/read/2020/12/26/163815526/babak-belur-apbn-2020-penerimaan-pajak-anjlok-pengeluaran-meroket>.
- Imbing. 2013. *analisis penetapan NJOP dan implikasinya.* <https://perpustakaan.pancabudi.ac.id>.
- indonesia, R. 2016. <http://www.bps.go.id> pembangunan Manusia-Badan pusat Statistika. <https://ipm.bps.go.id>.
- M.Fauzan. 2012. Akuntansi dan afektifitas pemungutan Bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah di kota semarang periode 2008-2011. *akunt.dan Ef.pemungutan Bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dan kontribusinya terhadap pendapatan drh.di kota semarang periode tahun 2008-2011 vol. 1, no 28,pp.1-11,2012.*
- M.Fauzan. 2012. Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan.
- mardiasmo. 2016. *Digital repository unuversitas jember.*

